



Dinas
pmp**ts****p****Kalsel**

BERGERAK !!!

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**JALAN BANGUN PRAJA KAWASAN PERKANTORAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BANJARBARU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. Penyusunan LAKIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LAKIP tahun 2018 ini disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSKUTIF	iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.2 Struktur Organisasi	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi	5

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	6
2.1.1. Tujuan dan Sasaran SKPD	7
2.2. Perjanjian Kinerja	9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1. Perbandingan Realisasi dengan Target.....	15
3.1.2 Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait	16
3.1.3. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.....	19
3.2. Analisis Terhadap Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	21
3.2.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3.2.2. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	22
3.3. Realisasi Anggaran.....	26

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	47
4.2. Solusi Mengatasi Kendala untuk Peningkatan Kinerja Mendatang	48

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan

program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 072 tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Tugas Pokok

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi

Adapun fungsi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

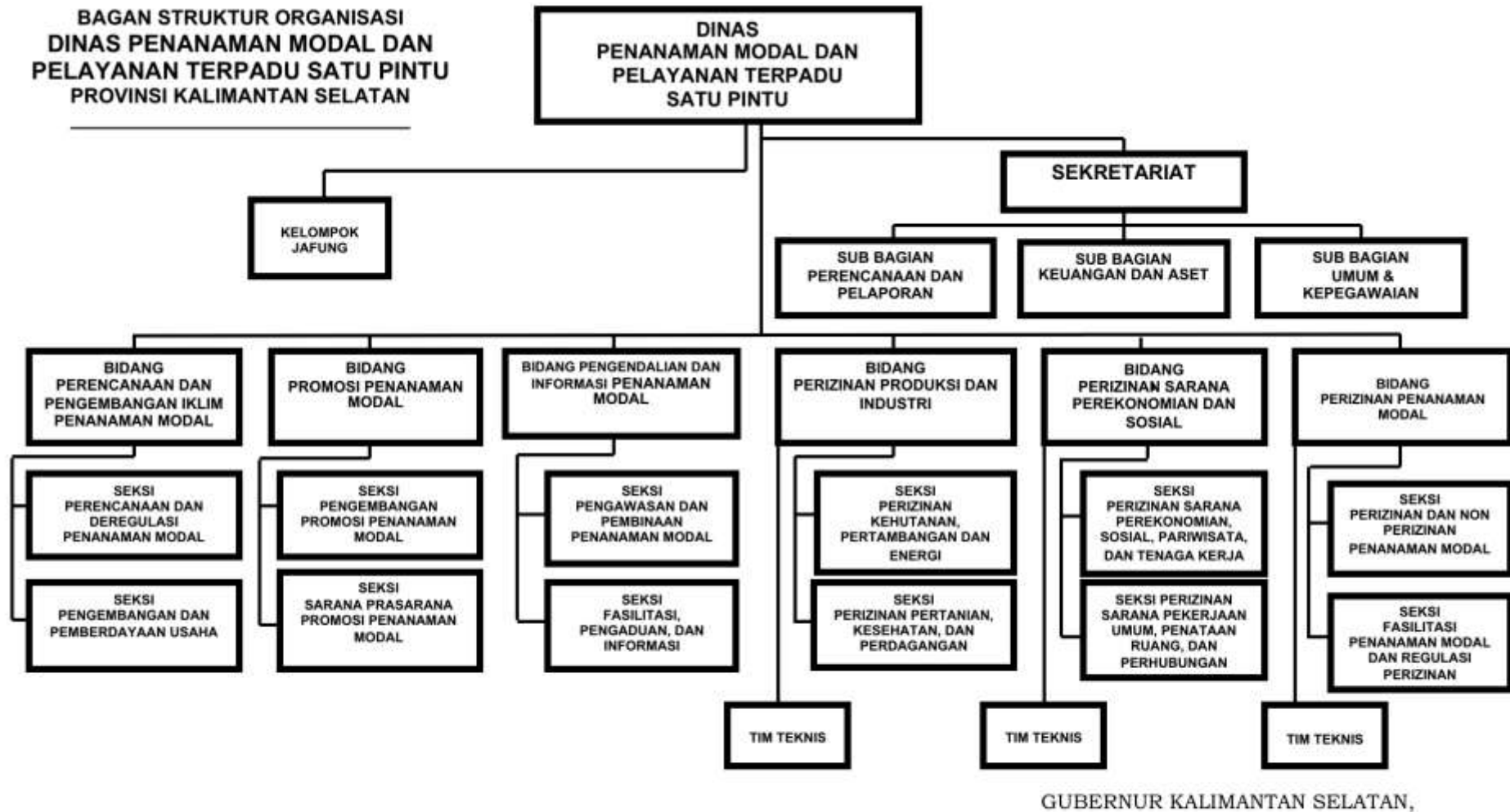
- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal
- d. Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri
- f. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial

- g. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

1.2.2. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian :
 - i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - iii. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim penanaman terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Sarana Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Fasilitasi, Pengaduan, dan Informasi
- f. Bidang Perizinan Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang
 - i. Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan
- g. Bidang Perizinan Produksi dan Industri terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi
 - ii. Sub Bidang Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan
- h. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perizinan Sarana Perekonomian, Sosia, Pariwisata, dan Tenaga Kerja
 - ii. Sub Bidang Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan



H. SAHBIRIN NOOR

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

Secara umum permasalahan terkait urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kalimantan Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan perundang-undangan belum optimal, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya dalam penanganan pelayanan.
- 2) Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.
- 4) Tim Teknis tidak berada dalam satu tempat sehingga pihak PTSP harus menyampaikan kembali untuk permintaan pertimbangan teknis yang berhubungan dengan permohonan izin tertentu.
- 5) Jaringan internet kurang optimal sehingga ada hambatan pada proses perizinan yang dilakukan secara online.
- 6) Untuk perizinan disektor perikanan (izin kapal) dan disektor perhubungan (izin perpanjangan trayek yang menjadi kewenangan), proses perizinan sudah dilakukan secara online, maka bagi pemohon minimal harus mempunyai HP android agar dapat mengaksesnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;

4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; Dan
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;

2.1.1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020 mengacu pada **Misi 5**.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



2.2. Perjanjian Kinerja

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

JABATAN	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEPALA	PENINGKATAN INVESTASI	1.Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp) 2.Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN (%)	Rp 8.1 Trilyun 15 %
	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
SEKRETARIS	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 2. Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan Kualitas SDM SKPD 4. Pelayanan Administrasi Keuangan	1. Persentase Kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP	5%
		2. Persentase aset yang tercatat harus	100%
		3. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	100%
		4. Persentase pemenuhan sarana dan prsarana yang dibutuhkan SKPD	80%
		5. Persentase penyerapan anggaran SKPD	100%
		6. Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	90%

KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1. Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP 2. Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP 3. Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	B B 100%
KASUBBAG KEUANGAN	1. Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD 2. Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	1. Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala 2. Jumlah aset yang diadakan	1 Buku 94 Buah
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Menyusun data kepegawaian evaluasi. serta administrasi kepegawaian SKPD 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SKPD	1. Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat 2. Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana 3. Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib 4. Jumlah peserta pelatihan/bimtek	1 Dokumen 11Dokumen 75 Orang 15 Orang
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PM	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha 2. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	2 Kerjasama 13
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN DEREGULASI PM	Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	1.Persentase Rekomendasi hasil Rakor/Forum yang ditindaklanjuti 2. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang terinventarisir	100% 13 Potensi
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA	Pengembangan Pemberdayaan Usaha	1. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	2 Kemitraan

KEPALA BIDANG PROMOSI	Peningkatan Efektifitas Promosi	1. Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Rp 9.7 Trilyun
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI	Pengembangan Promosi Investasi	1. Jumlah Item Bahan Promosi Investasi 2. Jumlah Sektor Potensi Investasi yang teridentifikasi	6 Item 2 sektor
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	1. Jumlah Potensi investasi daerah yang dipromosikan 2. Jumlah Pelaksanaan Pameran investasi	10 Potensi 8 Kali
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI PM	Pengendalian Pelaksanaan PM	1. Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM 2. Persentase Pengawasan Perusahaan PM	20% 30%
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PM	Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan Pembinaan PM	1. Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan 2. Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya	50% 300 perusahaan
KEPALA SEKSI FASILITASI, PENGADUAN DAN INFORMASI	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi	1. Inventarisasi dan Updating data SIPID. Investasi. Perizinan dan NonPerizinan 2. Persentase Kab/ Kota yang telah Menggunakan SIPID dan LKPM online 3. Persentase pengaduan yang difasilitasi	100% 60% 100%
KEPALA BIDANG PERIZINAN PRODUKSI DAN INDUSTRI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Produksi&Industri	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi&Industri	B
KEPALA SEKSI PERIZINAN KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Energi,&Perkebunan	Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kehutanan. Pertambangan. Energi &perkebunan sesuai SOP	100%
KEPALA SEKSI PERIZINAN PERTANIAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pertanian, Kesehatan &Perdagangan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian Kesehatan &Perdagangan sesuai SOP	100%

KEPALA BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN DAN SOSIAL	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial	B
KEPALA SEKSI PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN, SOSIAL, PARIWISATA DAN TENAGA KERJA	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata & Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sarana Perekonomian. Sosial. Pariwisata & Tenaga Kerja sesuai SOP	100%
KEPALA SEKSI SARANA PU, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana PU, Penataan Ruang & Perhubungan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sarana PU. Penataan Ruang & Perhubungan sesuai SOP	100%
KEPALA BIDANG PERIZINAN PM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal	B
KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PM	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal sesuai SOP	100%
KEPALA SEKSI FASILITASI PM DAN REGULASI PERIZINAN	Pengembangan Fasilitasi dan Regulasi Perizinan dan Non Perizinan	1. Persentase Kab/ Kota yang menerapkan Kebijakan PM 2. Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan SPIPISE terkait Perizinan	9 Kab/ Kota 60%

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Penmbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, telah ditetapkan 4 (empat) program prioritas urusan penanaman modal beserta indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)		
Urusan Penanaman Modal																	
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	%	-36,5	15	1,600	15	1,900	15	2,300	15	2,800	15	3,400	15	4,000	15	
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana investasi PMA dan PMDN	%	41	15	8,800	15	9,700	15	10,600	15	11,700	15	12,900	15	15,500	56	
Peningkatan Kapasitas dan kualitas Layanan Publik	Persentasi peningkatan jumlah perijinan dan nonperizinan	%	3000	5	-	5	2,109	5	2,320	5	2,552	5	2,807	5	3,088	25	
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Nonperizinan	%	14.81	14.81	3,110	15.55	3,110	16.3	2,750	17.04	2,750	17.78	2,750	18.82	3,085	18.52	

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kineja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN	%	41	15	15	15	15	15	15

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam perencanaan program kerja tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *ouput* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Dengan demikian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- 1) *Lebih dari 90%* untuk kategori capaian **Sangat Baik**;
- 2) *80% s/d 90%* untuk kategori capaian **Baik**;
- 3) *60% s/d 80%* untuk kategori capaian **Cukup**; dan
- 4) *Kurang dari 60%* untuk kategori capaian **Buruk**.

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa serta Meningkatnya Investasi dalam Aktifitas Perekonomian	Peningkatan Investasi dengan indikator : 1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp) 2. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN (%)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Peningkatan Nilai SAKIP dengan indikator : 4. Nilai SAKIP DPMPTSP Prov Kalsel

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 4 (empat) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021.

3.1.1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) kinerja utama dan indikator masing-masing dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENINGKATAN INVESTASI	1.Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	Rp 8.1 Trilyun	Rp 6.25 Trilyun	77,15%
	2.Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN (%)	15 %	-34,25%	-2,28%
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100%
PENINGKATAN NILAI LAKIP	Nilai SAKIP DPMPTSP Prov Kalsel	B	BB	100%

Kinerja tersebut didukung dengan 8 (delapan) program pembangunan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- 4) Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ;
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ;
- 7) Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik ; dan
- 8) Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan.

3.1.2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

i. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2016 (sesuai RPJMD)	Realisasi 2016 dan % capaian	Target 2017 (sesuai RPJMD)	Realisasi 2017 dan % capaian
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	7.100.000.000.000	9.504.960.000.000 (133,9%)	8.100.000.000.000	6.248.820.000.000 (77,15%)
2	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	15%	10,05% (67%)	15%	-34,25% (-2,28%)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B (100%)	B	B (100%)
4	Peningkatan Nilai LAKIP	B	B (100%)	B	BB (100%)

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 pada urusan penanaman modal yakni : Peningkatan Realisasi Investasi dengan target 15%.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2017 sebesar 6,25 triliun rupiah atau 77,15% dari target dengan peningkatan dari tahun 2016 sebesar -34,26%. Realisasi investasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun disisi lain rencana investasi (berdasarkan persetujuan/Izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan sebesar 38,9% dari tahun 2016. Hal ini menunjukkan perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan. Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan. Tidak tercapainya target peningkatan realisasi investasi tahun 2017 ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terjadi pergeseran (*shifting*) sektor usaha dari hulu ke hilir. Sektor-sektor pertambangan dan perkebunan tidak menjadi prioritas lagi dan beralih ke sektor hilirisasi industri
2. Kurangnya pengembangan pembangunan infrastruktur dasar, seperti listrik, jalan, air dan lainnya.
3. Kondisi Politik (menjelang Pilpres 2019)

ii. Perbandingan kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

Pencapaian kinerja sesuai dengan target pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada table berikut:

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPTSP PROV.KALSEL):																			
- Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	5,43	7,10	9,51	133.87%	8,10	6,25	77.15%	9,20			10,50			12,00			14,400,000,000,00		
- Peningkatan Investasi (%)	14.54	15	10.05	67.00%	15%	-34.25%	TIDAK TERCAPAI	15%			15%			15%			15%		
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	TERCAPAI	B	B	TERCAPAI	B			BB			BB			BB		
- Nilai SAKIP	B	B	B	TERCAPAI	B	BB	TERCAPAI	BB			BB			BB			BB		

iii. Perbandingan realisasi kinerja tingkat regional dan nasional

Indikator	Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional (Renstra BKPM RI)	Realisasi Nasional
Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	6,25	11,37	19,77	27,68	2,79	678,8	681,47

3.1.3. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - 1) Penyediaan jasa surat-menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 4) Penyediaan jasa Administrasi keuangan
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 10) Penyediaan makanan dan minuman
 - 11) Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 12) Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - 13) Penataan Perpustakaan
 - 14) Penyediaan Jasa Teknis Perizinan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 3) Pengadaan komputer
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 7) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - 1) Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - 1) Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal
 - 2) Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir tahun
- e) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:
 - 1) Pengembangan dan pemberdayaan usaha
 - 2) Penyelenggaraan pameran investasi
 - 3) Penyusunan Dokumen (Buku) peluang dan potensi investasi daerah
 - 4) Pelaksanaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal
 - 5) Pelayanan penanaman modal
 - 6) Forum kawasan industri Kalimantan Selatan
- f) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:
 - 1) Pengawasan dan pelaksanaan task force dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi
 - 2) Monitoring dan evaluasi perkembangan dan permasalahan investasi
 - 3) Perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat
- g) Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik, dengan kegiatan:
 - 1) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
 - 2) Penyusunan standar pelayanan SMM ISO 9001:2008
- h) Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan:
 - 1) Sosialisasi perizinan produksi dan industri
 - 2) Sosialisasi perizinan perekonomian dan sosial se Kalsel
 - 3) Rapat koordinasi perizinan perekonomian dan sosial dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel
 - 4) Rapat koordinasi perizinan produksi dan industri dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel
 - 5) Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian produksi dan industri

- 6) Peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial
- 7) Aplikasi dan sistem informasi pengelolaan perizinan secara online

3.2. Analisis Terhadap Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

3.2.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Anggaran Tahun 2017	Realisasi	Persentase
1	Peningkatan Investasi	Rp. 3.328.780.000	Rp. 3.165.536.750	98,92%
		Rp. 994.801.000	Rp. 794.464.600	79,86%
2.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	Rp. 1.356.080.000	Rp. 1.332.275.100	94,00%
3.	Peningkatan Nilai SAKIP	Rp. 5.881.077.000	Rp. 5.045.454.820	85,87%

Uraian	Pagu BKPM dan BPTSP 2016	Realisasi 2016	Pagu DPMPTSP 2017	Realisasi 2017
Belanja Langsung	11,143,002,900	9,160,340,859	11,610,738,000	10,337,731,270
Belanja Tidak Langsung	7,037,416,000	6,310,884,698	6,714,014,000	6,248,962,584
Belanja Pegawai	283,850,000	62,610,000	609,150,000	602,050,000
Belanja Barang Jasa	6,355,616,000	1,975,526,005	10,146,915,000	9,129,310,950
Belanja Modal	497,924,000	475,325,000	854,673,000	606,370,320

3.2.2. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Jabatan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
SEKRETARIS	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 2. Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan Kualitas SDM SKPD 4. Pelayanan Administrasi Keuangan	1. Persentase Kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP 2. Persentase aset yang tercatat harus 3. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD 5. Persentase penyerapan anggaran SKPD 6. Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5%	5%	100
				100%	100%	100
				100%	100%	100
				80%	80%	100
				100%	89%	89
				90%	90%	100
KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1. Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP 2. Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP 3. Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik 3. Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015	BB	BB	100
				B	B	100
				100%	6 Dok	100
KASUBBAG KEUANGAN	1. Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD 2. Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	1. Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala 2. Jumlah aset yang diadakan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Buku	1 Buku	100
				259 Buah	259 buah	100

			7. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8. Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Peloran Keuangan Akhir Tahun			
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Menyusun data kepegawaian evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SKPD	1. Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat 2. Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana 3. Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib 4. Jumlah peserta pelatihan/bimtek	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Dokumen	11 Dokumen	100
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	75 Orang	75 Orang	100
			3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7. Penataan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10. Pengadaan Komputer 11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 14. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15. Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	15 Orang	16 Orang	106
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PM	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2 Kerjasama	2 Kerjasama	100
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN DEREGULASI PM	Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Persentase Rekomendasi hasil Rakor/Forum yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	100%	100%	100

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA	Pengembangan Pemberdayaan Usaha	1. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	2 Kemitraan	3 Kemitraan	150
KEPALA BIDANG PROMOSI	Peningkatan Efektifitas Promosi	1. Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 9.7 Trilyun	12.5 Triliun	128,87
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI	Pengembangan Promosi Investasi	1. Jumlah Item Bahan Promosi Investasi 2. Jumlah Sektor Potensi Investasi yang teridentifikasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	6 Item	6 Item	100
				2 sektor	2 sektor	100
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	1. Jumlah Potensi investasi daerah yang dipromosikan 2. Jumlah Pelaksanaan Pameran investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	10 Potensi	10 Potensi	100
				8 Kali	11 Kali	137,5
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI PM	Pengendalian Pelaksanaan PM	1. Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	20%	22,8%	103,6
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PM	Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan Pembinaan PM	1. Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan 2. Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi 2. Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	50%	100%	200
				300 perusahaan	250 Perusahaan	83,33
KEPALA SEKSI FASILITASI, PENGADUAN DAN INFORMASI	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi	1. Inventarisasi dan Updating data SIPID. Investasi. Perizinan dan NonPerizinan 2. Persentase Kab/ Kota yang telah Menggunakan SIPID dan LKPM online	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Mod	100%	100%	100
				50%	61%	122
KEPALA BIDANG PERIZINAN PRODUKSI DAN INDUSTRI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Produksi & Industri	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi & Industri	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	B	B	100
KEPALA SEKSI PERIZINAN KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Energi, & Perkebunan	Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kehutanan. Pertambangan. Energi & perkebunan sesuai SOP	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri 2. Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel	100%	100%	100

KEPALA SEKSI PERIZINAN PERTANIAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pertanian, Kesehatan & Perdagangan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian Kesehatan & Perdagangan sesuai SOP	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	100%	100%	100
KEPALA BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN DAN SOSIAL	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	B	B	100
KEPALA SEKSI PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN, SOSIAL, PARIWISATA DAN TENAGA KERJA	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata & Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sarana Perekonomian. Sosial. Pariwisata & Tenaga Kerja sesuai SOP	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial se Kalsel	100%	100%	100
KEPALA SEKSI SARANA PU, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana PU, Penataan Ruang & Perhubungan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sarana PU. Penataan Ruang & Perhubungan sesuai SOP	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi terkait dan kab/Kota se Kalsel 2. Peninjauan Lapangan untuk syarat Teknis Pemberian Ijin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	100%	100%	100
KEPALA BIDANG PERIZINAN PM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	B	BB	100
KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PM	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal sesuai SOP	Program Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik 2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100
KEPALA SEKSI FASILITASI PM DAN REGULASI PERIZINAN	Pengembangan Fasilitasi dan Regulasi Perizinan dan Non Perizinan	1. Persentase Kab/ Kota yang menerapkan Kebijakan PM 2. Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan SPIPISE terkait Perizinan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Pelayanan Penanaman Modal	9 Kab/ Kota 60%	9 Kab/ Kota 69%	100 138

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sebesar 89,04% dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan Kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan alat tulis kantor kinerja/fisik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penataan perpustakaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan jasa teknis perizinan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan kegiatan:
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

- Pengadaan komputer dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan kegiatan:
- Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan:
- Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir tahun dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 7 dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
- Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.328.780.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.165.536.750,- atau 95,10% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.700.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.592.484.550,- atau 93,68% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan pameran di dalam dan luar negeri sebanyak 11 kali dan potensi investasi daerah yang dipromosikan sebanyak 10 potensi: pembibitan dan penggemukan sapi potong, industri semen, pengolahan rumput laut, budidaya ikan kerapu, pengeloahan ikan air tawar, Kawasan

Industri Jorong, Kawasan Industri Batulicin, wisata Pasar Terapung, pengembangan Loksado, Industri Hilir kelapa sawit.

- Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 291.261.300,- atau 97,07% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah jumlah kemitraan dunia usaha 3 Kemitraan.
- Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 278.780.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 262.277.550,- atau 94,08% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di bidang Penanaman Modal 2 kali: 1) Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal serta SPIPISE ; 2) Izin Usaha dan SPIPISE, 1 Dokumen Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan terkait SPIPISE, 1 Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal di Kalimantan Selatan.
- Kegiatan Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 386.425.300,- atau 96,61% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 100% tersedianya bahan promosi investasi sebanyak 6 item yaitu: spanduk, brosur, buku, baliho, Leaflet, dan banner. Jumlah sektor potensi investasi yang teridentifikasi sebanyak 2 (dua) dokumen yakni Potensi Pariwisata Pesisir Pantai Daerah Kalimantan Selatan ; dan Dokumentasi Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Perkembangan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan di Kalimantan Selatan.
- Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 333.571.550,- atau 95,31% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah Inventarisasi dan updating data SIPID, LKPM online, investasi, perizinan dan non perizinan dengan realisasi 100% dan Kab/Kota yang telah menggunakan SIPID 5 Kab/Kota dan SIPIPISE (LKPM online) 11 Kab/Kota sehingga capaian sebesar 61,00%.
- Kegiatan Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 299.561.500,- atau 99,85 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil

kegiatan ini adalah terlaksananya forum investasi Kalimantan Selatan, dimana mempromosikan 2 kawasan industri dan 8 potensi investasi strategis Kalimantan Selatan.

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 994.801.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 794.464.600,- atau 79,86% dan realisasi fisik sebesar 90,40%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 391.871.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 323.261.900,- atau 82,49 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force kepada perusahaan sebanyak 83 BAP.

- Kegiatan Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 338.780.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 218.524.300,- atau 64,50 % dan realisasi fisik sebesar 88,37%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring evaluasi ke 76 perusahaan.

- Kegiatan Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 264.150.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 253.036.000,- atau 95,79% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan Rakernis atau RKPPMD dan Rakorpus atau KP3MN dengan persentase rekomendasi hasil Rakor yang ditindaklanjuti 100,00%.

7. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik,

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 336.550.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 311.508.200,- atau 92,56% dan realisasi fisik sebesar 81,43%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 24.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 23.713.200,- atau 98,81 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah melaksanakan survey kepuasan terhadap pemohon

perizinan dan non perizinan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 78,80% (B).

- Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2008

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 312.550.000 dan teralisasi sebesar Rp. 287.795.000,- atau 92,08% dan realisasi fisik sebesar 80,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan berdasarkan SMM ISO 9001:2015.

8. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan,

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.069.530.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.020.766.900,- atau 95,44% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 118.804.500,- atau 91,39% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri sebanyak 2 kali, yaitu : 1) bidang kehutanan (pengelolaan hasil hutan) di Alalak, 2) bidang perikanan di Muara Kintap.

- Kegiatan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 68.133.000,- atau 96,64% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisai perizinan bidang perekonomian dan sosial sebanyak 13 kali.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 56.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 53.441.200,- atau 95,43% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi perizinan dengan Instansi terkait dan Kab/Kota sebanyak 6 kali.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 43.777.500,- atau 87,56% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi perizinan bidang produksi dan industri dengan Instansi terkait dan Kab/Kota sebanyak 1 kali yang menghasilkan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan.

- Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 114.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 111.904.000,- atau 97,73% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin sebanyak 41 kali.

- Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Produksi dan Industri

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 140.748.500,- atau 93,83% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin sebanyak 35 kali.

- Kegiatan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan secara online
- Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 498.530.000 dan teralisasi sebesar Rp. 483.958.200,- atau 97,08% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah tersedianya aplikasi dan database perizinan secara online.

Adapun rekapitulasi tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

**REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN FISIK
DPMPTSP PROV KALSEL TA 2017**

No	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Dana	Serapan		Sisa Pagu
				R	R	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,829,982,000.00	86.61	100.00	512,662,900.00
	• Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Tersedianya jasa teknis perizinan	282,840,000.00	99.70	100.00	848,000.00
	• Penataan Perpustakaan	Terlaksananya penataan perpustakaan	58,856,000.00	97.92	100.00	1,224,400.00
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah	350,000,000.00	99.39	100.00	2,141,000.00
	• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,174,000,000.00	83.42	100.00	194,599,400.00

	• Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	356,510,000.00	78.49	100.00	76,683,000.00
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	330,560,000.00	59.95	100.00	132,403,500.00
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,500,000.00	70.85	100.00	29,297,000.00
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	132,000,000.00	95.38	100.00	6,093,500.00
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	110,000,000.00	99.67	100.00	361,000.00
	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan	205,000,000.00	99.95	100.00	108,900.00
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	202,800,000.00	95.54	100.00	9,050,000.00
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya listrik, air dan komunikasi	426,416,000.00	87.25	100.00	54,361,100.00
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	15,500,000.00	64.94	100.00	5,433,600.00
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85,000,000.00	99.93	100.00	58,500.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,606,095,000.00	85.29	100.00	236,195,780.00
	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	193,000,000.00	91.46	100.00	16,489,700.00
	• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	77,000,000.00	83.54	100.00	12,677,860.00
	• Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer	100,000,000.00	82.49	100.00	17,505,120.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	371,572,000.00	99.73	100.00	1,021,200.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	388,190,000.00	57.81	100.00	163,772,800.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	161,000,000.00	91.20	100.00	14,164,100.00
	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	315,333,000.00	96.65	100.00	10,565,000.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		300,000,000.00	71.60	100.00	85,193,000.00
	• Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300,000,000.00	71.60	100.00	85,193,000.00

4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		145,000,000.00	98.92	100.00	1,570,500.00
	• Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	Tersedianya dokumen penatalaksanaan, perencanaan dan pelaporan kinerja	120,000,000.00	98.69	100.00	1,570,500.00
	• Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	25,000,000.00	100.00	100.00	0.00
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3,328,780,000.00	95.10	100.00	163,243,250.00
	• Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Terlaksananya Rakor Kawasan Industri Batulicin	300,000,000.00	99.85	100.00	438,500.00
	• Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Terlaksananya pelatihan SIPID kepada Kab/Kota, Terlaksananya updating data SIPID	350,000,000.00	95.31	100.00	16,428,450.00
	• Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi pelayanan penanaman modal	278,780,000.00	94.08	100.00	16,502,450.00
	• Penyusunan Dokumen (BUKU) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	Tersedianya data dan informasi potensi penanaman modal	400,000,000.00	96.61	100.00	13,574,700.00
	• Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya pameran investasi	1,700,000,000.00	93.68	100.00	107,515,450.00
	• Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Terlaksananya koordinasi untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha	300,000,000.00	97.07	100.00	8,783,700.00
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		994,801,000.00	79.86	96.00	200,336,400.00
	• Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	Terlaksananya RKPPMD, KP3MN dan sinkronisasi program terkait pengembangan penanaman modal	264,150,000.00	95.66	100.00	11,471,600.00
	• Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi	Terlaksananya monitoring evaluasi	338,780,000.00	64.50	88.00	120,255,700.00
	• Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force	391,871,000.00	82.49	100.00	68,609,100.00
7	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik		336,550,000.00	92.56	90.00	25,041,800.00
	• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan pemohon perizinan	24,000,000.00	98.81	100.00	286,800.00

	• Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008	Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayana	312,550,000.00	92.08	80.00	24,755,000.00
8	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan		1,069,530,000.00	95.44	100.00	48,763,100.00
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	Terlaksananya pelayanan perizinan dibidang produksi dan industri	150,000,000.00	93.83	100.00	9,251,500.00
	• Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Tersedianya aplikasi dan database perijinan secara online	498,530,000.00	97.08	100.00	14,571,800.00
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	Terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian ijin	114,500,000.00	97.73	100.00	2,596,000.00
	• Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Terlaksananya koordinasi perijinan dengan instansi terkait dan kab/kota	56,000,000.00	95.43	100.00	2,558,800.00
	• Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	Terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri	130,000,000.00	91.39	100.00	11,195,500.00
	• Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel	Terlaksananya sistem pelayanan perizinan yang transparan	70,500,000.00	96.64	100.00	2,367,000.00
	• Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Terlaksananya pelayanan perijinan dibidang produksi dan industri	50,000,000.00	87.56	100.00	6,222,500.00
	Total		11,610,738,000.00	89.04	98.25	1,273,006,730.00

Adapun perbandingan belanja dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran				Realisasi			
		2016 BKPM	2016 BPTSP	2016	2017	2016 BKPM	2016 BPTSP	2016	2017
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,630,220,000	2,332,900,400	4,963,120,400	3,829,982,000	957,646,750	2,083,544,268	3,041,191,018	3,317,319,100
	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20,000,000	99,440,000	119,440,000	205,000,000	0	98,510,165	98,510,165	204,891,100
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	9,000,000	16,000,000	15,500,000	4,815,000	0	4,815,000	10,066,400
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	37,000,000	100,000,000	137,000,000	110,000,000	0	99,923,200	99,923,200	109,639,000
	• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,000,000	20,000,000	38,000,000	85,000,000	0	19,919,900	19,919,900	84,941,500
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500,000,000	382,475,000	882,475,000	426,416,000	247,189,450	228,955,932	476,145,382	372,054,900
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	134,800,000	77,000,000	211,800,000	202,800,000	9,450,000	76,912,500	86,362,500	193,750,000
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69,440,000	7,000,000	76,440,000	100,500,000	260,000	6,000,000	6,260,000	71,203,000
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177,000,000	122,000,000	299,000,000	330,560,000	312,677,750	75,763,684	388,441,434	198,156,500
	• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1,211,980,000	690,455,400	1,902,435,400	1,174,000,000	300,296,550	676,155,822	976,452,372	979,400,600

	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000	80,000,000	115,000,000	132,000,000	29,302,000	79,947,100	109,249,100	125,906,500
	• Penyediaan Makanan dan Minuman	190,000,000	108,560,000	298,560,000	356,510,000	53,050,000	89,327,500	142,377,500	279,827,000
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	230,000,000	360,000,000	590,000,000	350,000,000	606,000	359,845,700	360,451,700	347,859,000
	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	0	276,970,000	276,970,000	282,840,000	0	272,282,765	272,282,765	281,992,000
	Penataan Perpustakaan				58,856,000	0		0	57,631,600
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	953,004,000	1,358,764,600	2,311,768,600	1,606,095,000	730,700,800	1,242,784,996	1,973,485,796	1,369,899,220
	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	64,424,000	767,339,600	831,763,600	193,000,000	2,674,000	744,946,500	747,620,500	176,510,300
	• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	211,500,000	0	211,500,000	77,000,000	100,511,000	0	100,511,000	64,322,140
	• Pengadaan Komputer	122,000,000	243,125,000	365,125,000	100,000,000	0	221,799,914	221,799,914	82,494,880
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	251,440,000	134,440,000	385,880,000	371,572,000	499,371,000	110,526,215	609,897,215	370,550,800
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	166,140,000	121,360,000	287,500,000	388,190,000	41,628,300	95,327,967	136,956,267	224,417,200
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31,000,000	77,500,000	108,500,000	161,000,000	17,075,000	66,970,900	84,045,900	146,835,900

	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0	15,000,000	15,000,000	0	0	3,213,500	3,213,500	0
	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	106,500,000	0	106,500,000	315,333,000	69,441,500	0	69,441,500	304,768,000
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	361,970,000	140,000,000	501,970,000	300,000,000	336,178,700	109,900,000	446,078,700	214,807,000
	• Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	224,970,000	0	224,970,000	300,000,000	200,490,800	0	200,490,800	214,807,000
	• Pengembangan Wawasan SDM BKPMD Prov. Kalsel	137,000,000	0	137,000,000	0	135,687,900	0	135,687,900	0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	140,000,000	140,000,000	0	0	109,900,000	109,900,000	0
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	63,947,900	78,947,900	145,000,000	9,167,000	62,138,300	71,305,300	118,429,500
	• Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15,000,000	7,050,000	22,050,000	25,000,000	9,167,000	6,062,500	15,229,500	0
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	53,397,900	53,397,900	0	0	52,928,000	52,928,000	0
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	0	3,500,000	3,500,000	0	0	3,147,800	3,147,800	0

	Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program penanaman Modal	0	0	0	120,000,000	0	0	0	118,429,500
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	0	100,000,000	100,000,000	0	0	67,382,500	67,382,500	0
	Pengembangan Promosi Pelayanan Perizinan	0	100,000,000	100,000,000	0	0	67,382,500	67,382,500	0
6	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum	0	10,000,000	10,000,000	0	0	9,468,200	9,468,200	0
	Penyusunan IKM	0	10,000,000	10,000,000	0	0	9,468,200	9,468,200	0
7	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1,868,540,000	0	1,868,540,000	3,328,780,000	1,476,748,345	0	1,476,748,345	3,165,537,050
	• Kerjasama Bidang Penanaman Modal	167,800,000	0	167,800,000	0	163,096,900	0	163,096,900	0
	• Inventarisasi Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	215,000,000	0	215,000,000	0	186,400,100	0	186,400,100	0
	Pengembangan dan pemberdayaan Usaha	0	0	0	300,000,000	0	0	0	291,216,300
	• Penyelenggaraan Pameran Investasi	1,068,440,000	0	1,068,440,000	1,700,000,000	798,272,845	0	798,272,845	1,592,484,550
	• Pembinaan Pelayanan Penanaman Modal	182,300,000	0	182,300,000	0	179,470,500	0	179,470,500	0
	• Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	235,000,000	0	235,000,000	400,000,000	149,508,000	0	149,508,000	386,425,600
	Pelayanan Penanaman Modal	0	0	0	278,780,000	0	0	0	262,277,550

	Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan penanaman Modal	0	0	0	350,000,000	0	0	0	333,571,550
	Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan	0	0	0	300,000,000	0	0	0	299,561,500
8	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1,308,656,000	0	1,308,656,000	994,801,000	1,210,184,600	0	1,210,184,600	794,464,600
	Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	0	0	0	264,150,000	0	0	0	252,678,400
	Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	0	0	0	391,871,000	0	0	0	323,261,900
	• Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal	360,496,000	0	360,496,000	0	322,059,350	0	322,059,350	0
	• Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah	195,000,000	0	195,000,000	338,780,000	157,254,400	0	157,254,400	218,524,300
	• Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	80,720,000	0	80,720,000	0	73,069,000	0	73,069,000	0
	• Penyusunan Dokumen RUPM	474,440,000	0	474,440,000	0	462,158,200	0	462,158,200	0
	• Rapat Koordinasi Perencanaan PM Tingkat Provinsi dan Pusat	198,000,000	0	198,000,000	0	195,643,650	0	195,643,650	0

9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	0	0	0	336,550,000	0	0	0	311,508,200
	• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	24,000,000	0	0	0	23,713,200
	• Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008	0	0	0	312,550,000	0	0	0	287,795,000
10	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	0	0	0	1,069,530,000	0	0	0	1,020,767,400
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	0	0	0	150,000,000	0	0	0	140,748,500
	• Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	0	0	0	498,530,000	0	0	0	483,958,200
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	0	0	0	114,500,000	0	0	0	111,904,000

	• Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	0	0	0	56,000,000	0	0	0	53,441,200
	• Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	0	0	0	130,000,000	0	0	0	118,805,000
	• Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel	0	0	0	70,500,000	0	0	0	68,133,000
	• Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	0	0	0	50,000,000	0	0	0	43,777,500
	TOTAL	7,137,390,000	4,005,612,900	11,143,002,900	11,610,738,000	4,720,626,195	3,575,218,264	8,295,844,459	10,312,732,070
	PERSENTASE					66.14%	89.26%	74.45%	88.82%

Evaluasi Program Dalam rangka Efisiensi Penggunaan Dana disajikan dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran	Realisasi
		2017	2017
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.829.982.000	3,317,319,100 (86%)
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.606.095.000	1,369,899,220 (85%)
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300.000.000	214,870,00 (71%)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	145.000.000	143,430,000 (98%)
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	3.328.780.000	3,165,536,750 (95%)
6	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	994.801.000	794,464,600 (79%)
7	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	336.550.000	311,508,200 (92%)
8	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	1.069.530.000	1,020,767,400 (95%)
	JUMLAH	11.610.738.000	10,337,731,270 (89,04%)

Perbandingan Kegiatan Tahun 2017 sebagai bentuk Evaluasi Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Dana

No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran	Realisasi
		2017	2017
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.829.982.000	3.317.319.100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	205.000.000	204.891.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.500.000	10.066.400
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.000.000	109.639.000
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	84.941.500
	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.416.000	372.054.900
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	202.800.000	193.750.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.500.000	71.203.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.560.000	198.156.500
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.174.000.000	979.400.600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132.000.000	125.906.500
	Penyediaan Makanan dan Minuman	356.510.000	279.827.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	350.000.000	347.859.000
	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	282.840.000	281.992.000
	Penataan Perpustakaan	58.856.000	57.631.600
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.606.095.000	1.369.899.220
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	193.000.000	176.510.300
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.000.000	64.322.140
	Pengadaan Komputer	100.000.000	82.494.880
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	371.572.000	370.550.800
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	388.190.000	224.417.200
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	161.000.000	146.835.900
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0	0

	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	315.333.000	304.768.000
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300.000.000	214.807.000
	Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	300.000.000	214.807.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	145.000.000	143.429.500
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25.000.000	25.000.000
	Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program penanaman Modal	120.000.000	118.429.500
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	3.328.780.000	3.165.536.750
	Pengembangan dan pemberdayaan Usaha	300.000.000	291.216.300
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	1.700.000.000	1.592.484.550
	Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	400.000.000	386.425.300
	Pelayanan Penanaman Modal	278.780.000	262.277.550
	Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan penanaman Modal	350.000.000	333.571.550
	Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan	300.000.000	299.561.500
6	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	994.801.000	794.464.600
	Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	264.150.000	252.678.400
	Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	391.871.000	323.261.900
	Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah	338.780.000	218.524.300
7	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	336.550.000	311.508.200
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	24.000.000	23.713.200
	Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008	312.550.000	287.795.000
8	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	1.069.530.000	1.020.766.900
	Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	150.000.000	140.748.500
	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	498.530.000	483.958.200

	Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	114.500.000	111.904.000
	Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	56.000.000	53.441.200
	Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	130.000.000	118.804.500
	Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel	70.500.000	68.133.000
	Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	50.000.000	43.777.500
	Jumlah Pagu	11.610.738.000	10.337.731.270

Perbandingan APBD antara Tahun 2017 Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Dana

Uraian	Pagu DPMPTSP 2017	Realisasi 2017
Belanja Langsung	11.610.738.000	10.337.731.270
Belanja Tidak Langsung	6.714.014.000	6.248.962.584
Belanja Pegawai	609.150.000	602.050.000
Belanja Barang Jasa	10.146.915.000	9.129.310.950
Belanja Modal	854.673.000	606.370.320

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran strategik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran strategik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2017 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2017. Dengan demikian di dalam LAKIP Tahun 2017 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat di pertanggung jawabkan.

Secara keseluruhan dalam tahun 2017 terdapat 1 sasaran strategik yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk mengukur keberhasilannya, terhadap masing-masing sasaran tersebut ditetapkan indikator sasaran yang melekat sesuai dengan strategiknya. Dari sasaran strategik tahun 2017 yang telah ditetapkan di dalam perencanaan strategik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, seluruhnya dapat dicapai dengan baik.

4.2. Solusi Mengatasi Kendala untuk Peningkatan Kinerja Mendatang

Dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan :

- a. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
- c. Pelaksanaan evaluasi LKPM
- d. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
- e. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelahitan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
- f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
- h. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);

- c. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN KINERJA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah :Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86,61%			100,00%
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat	Rp. 15.500.000	Rp. 10.066.400	64,94%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 426.416.000	Rp. 372.054.900	87,25%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	3) Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 202.800.000	Rp. 193.750.000	95,54%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	4) Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 205.000.000	Rp. 204.891.100	99,95%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	5) Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 110.000.000	Rp. 109.639.000	99,67%	100%	100%	100,00%
	6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 132.000.000	Rp. 125.906.500	95,38%	100%	100%	100,00%
	7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 85.000.000	Rp. 84.941.500	99,93%	100%	100%	100,00%
	8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 100.500.000	Rp. 71.203.000	70,85%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 330.560.000	Rp. 198.156.500	59,95%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	10) Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 356.510.000	Rp. 279.827.000	78,49%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaian dilayani secara tertib	Rp. 1.174.000.000	Rp. 979.400.600	83,42%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaian dilayani secara tertib	Rp. 350.000.000	Rp. 347.859.000	99,39%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	13) Penataan Perpustakaan	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 58.856.000	Rp. 57.631.600	97,92%	12 bulan	12 bulan	100,00%
	14) Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Tersedianya Jasa Teknis Perizinan	Rp. 282.840.000	Rp. 281.992.000	99,70%	100%	100%	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 3.829.982.000	Rp. 3.317.319.100				100%
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				85,29%			100,00%
	15) Pengadaan komputer	Jumlah Aset yang diadakan	Rp. 100.000.000	Rp. 82.494.880	82,49%	10 Unit	11 Unit	100,00%
	16) Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Aset yang diadakan	Rp. 77.000.000	Rp. 64.322.140	83,54%	8 Buah	8 Buah	100,00%
	17) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Aset yang diadakan	Rp. 193.000.000	Rp. 176.510.300	91,46%	75 Buah	75 Buah	100,00%
	18) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 388.190.000	Rp. 224.417.200	57,81%	20 Buah	20 Buah	100,00%

	19) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 161.000.000	Rp. 146.835.900	91,20%	7 Buah	7 Buah	100,00%
	20) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Aset yang diadakan	Rp. 315.333.000	Rp. 304.768.000	96,65%	100%	100%	100,00%
	21) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 371.572.000	Rp. 370.550.800	99,73%	100%	100%	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 1.606.095.000	Rp. 1.369.899.220				
Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang Paham	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				71,60%			95,00%
	22) Kursus, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Tekbis PNS	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek	Rp. 300.000.000	Rp. 214.807.000	71,60%	100%	100%	95,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 300.000.000	Rp. 214.807.000				
Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				98,92%			100%
Persentase aset yang tercatat		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100,00%	100%	100%	95,00%
Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	23) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun							
	24) Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	Rp. 120.000.000	Rp. 118.429.500	98,69%	BB BB 7 Dokumen	BB BB 7 Dokumen	95,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 145.000.000	Rp. 143.429.500				
Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				84,13%			100%
	25) Penyusunan Dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah	Jumlah Item Bahan Promosi Investasi Jumlah Sektor Potensi Investasi yang teridentifikasi	Rp. 400.000.000	Rp. 386.425.300	96,61%	6 Item 2 Sektor	6 Item 2 Sektor	100,00%
	26) Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi	Rp. 1.700.000.000	Rp. 1.592.484.550	93,68%	10 Potensi 8 Kali	10 Potensi 11 Kali	100,00%
	27) Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	Rp. 300.000.000	Rp. 291.216.300	97,07%	2 Kemitraan	3 Kemitraan	100,00%
	28) Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Inventarisasi dan Updating Data SIPID, Investasi, Perizinan dan Non Perizinan Persentase Kab/Kota yang telah menggunakan	Rp. 350.000.000	Rp. 333.571.550	95,31%	100% 50%	100% 61%	100,00%
	29) Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan penanaman modal Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan SPIPISE terkait Perizinan	Rp. 278.780.000	Rp. 262.277.550	94,08%	9 Kab/Kota 50%	9 Kab/Kota 50%	100,00%
	30) Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Persentase rekomendasi Hasil forum yang ditindaklanjuti	Rp. 300.000.000	Rp. 299.561.500	99,85%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp. 3.328.780.000	Rp. 3.165.536.750				

PENGUKURAN KINERJA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2017

Program/Kegiatan	Keuangan		Capaian Kinerja Program/Kegiatan
	Target	Realisasi	
2	4		9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,61%	<u>100,00%</u>
1) Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	64,94%	100,00%
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	87,25%	100,00%
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	95,54%	100,00%
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	99,95%	100,00%
5) Penyediaan alat tulis kantor	100%	99,67%	100,00%
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	95,38%	100,00%
7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	99,93%	100,00%
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	70,85%	100,00%
9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	59,95%	100,00%
10) Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	78,49%	100,00%
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	83,42%	100,00%
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	99,39%	100,00%
13) Penataan Perpustakaan	12 bulan	97,92%	100,00%
14) Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	100%	99,70%	100,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85,29%	<u>100,00%</u>
15) Pengadaan komputer	10 Unit	82,49%	100,00%
16) Pengadaan peralatan gedung kantor	8 Buah	83,54%	100,00%
17) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75 Buah	91,46%	100,00%
18) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20 Buah	57,81%	100,00%
19) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7 Buah	91,20%	100,00%
20) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	96,65%	100,00%
21) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	99,73%	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		71,60%	<u>95,00%</u>
22) Kursus, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100%	71,60%	95,00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		98,92%	<u>100%</u>
23) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	100,00%	95,00%
24) Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	BB BB 7 Dokumen	98,69%	95,00%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		95,10%	<u>100%</u>
25) Penyusunan Dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah	6 Item 2 Sektor	96,61%	100,00%
26) Penyelenggaraan pameran investasi	10 Potensi 8 Kali	93,68%	100,00%
27) Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	2 Kemitraan	97,07%	100,00%
28) Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100% 50%	95,31%	100,00%
29) Pelayanan Penanaman Modal	9 Kab/Kota 50%	94,08%	100,00%
30) Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan	1 dokumen	99,85%	100,00%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		79,86%	<u>90,40%</u>
31) Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	100%	95,66%	100,00%
32) Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi	300 Perusahaan	64,50%	86,00%
33) Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	83 BAP	82,49%	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik		92,56%	<u>81,43%</u>
34) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen	98,81%	100,00%
35) Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015	1 Dokumen	92,08%	80,00%
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik		95,44%	<u>100,00%</u>
36) Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	1 Kali	91,39%	100,00%
37) Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial	1 Kali	96,64%	100,00%
38) Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel	1 Kali	95,43%	100,00%
39) Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel	1 Dokumen	87,56%	100,00%
40) Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Secara Online	1 Paket	97,08%	100,00%
41) Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	1 Dokumen	93,83%	100,00%
42) Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	1 Kali	97,73%	100,00%

Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					<u>79,86%</u>			<u>90,40%</u>	
	31) Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	Persentase rekomendasi Hasil forum yang ditindaklanjuti	Rp.	264.150.000	Rp.	252.678.400	95,66%	100%	100%	100,00%
	32) Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal (PMA/PMDN) yang melaksanakan kegiatannya	Rp.	338.780.000	Rp.	218.524.300	64,50%	300 Perusahaan	250 Perusahaan	86,00%
	33) Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Jumlah Penatakasanaan perencanaan dan program	Rp.	391.871.000	Rp.	323.261.900	82,49%	83 BAP	83 BAP	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp.	994.801.000	Rp.	794.464.600				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik						<u>92,56%</u>			<u>81,43%</u>
	34) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	Rp.	24.000.000	Rp.	23.713.200	98,81%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	35) Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015	Dokumen ISO	Rp.	312.550.000	Rp.	287.795.000	92,08%	1 Dokumen	1 Dokumen	80,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp.	336.550.000	Rp.	311.508.200				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik						<u>95,44%</u>			<u>100,00%</u>
	36) Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	Dokumen IKM	Rp.	130.000.000	Rp.	118.804.500	91,39%	1 Kali	2 Kali	100,00%
	37) Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial	Dokumen ISO	Rp.	70.500.000	Rp.	68.133.000	96,64%	1 Kali	11 Kali	100,00%
	38) Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel	Dokumen ISO	Rp.	56.000.000	Rp.	53.441.200	95,43%	1 Kali	6 Kali	100,00%
	39) Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel	Dokumen ISO	Rp.	50.000.000	Rp.	43.777.500	87,56%	1 Dokumen	4 Kali	100,00%
	40) Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Secara Online	Dokumen ISO	Rp.	498.530.000	Rp.	483.958.200	97,08%	1 Paket	1 Paket	100,00%
	41) Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	Dokumen ISO	Rp.	150.000.000	Rp.	140.748.500	93,83%	1 Dokumen	35 Kali	100,00%
	42) Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	Dokumen ISO	Rp.	114.500.000	Rp.	111.904.000	97,73%	1 Kali	41 Kali	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja		Rp.	1.069.530.000	Rp.	1.020.766.900				
Rata- rata capaian kinerja keseluruhan			Rp.	11.610.738.000	Rp.	10.337.731.270	89,04%			

PENGUKURAN KINERJA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2017

Program/Kegiatan	Keuangan		Capaian Kinerja Program/Kegiatan
	Target	Realisasi	
2	4		9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,61%	<u>100,00%</u>
1) Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	64,94%	100,00%
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	87,25%	100,00%
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	95,54%	100,00%
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	99,95%	100,00%
5) Penyediaan alat tulis kantor	100%	99,67%	100,00%
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	95,38%	100,00%
7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	99,93%	100,00%
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	70,85%	100,00%
9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	59,95%	100,00%
10) Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	78,49%	100,00%
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	83,42%	100,00%
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	99,39%	100,00%
13) Penataan Perpustakaan	12 bulan	97,92%	100,00%
14) Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	100%	99,70%	100,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85,29%	<u>100,00%</u>
15) Pengadaan komputer	10 Unit	82,49%	100,00%
16) Pengadaan peralatan gedung kantor	8 Buah	83,54%	100,00%
17) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75 Buah	91,46%	100,00%
18) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20 Buah	57,81%	100,00%
19) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7 Buah	91,20%	100,00%
20) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	96,65%	100,00%
21) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	99,73%	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		71,60%	<u>95,00%</u>
22) Kursus, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100%	71,60%	95,00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		98,92%	<u>100%</u>
23) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	100,00%	95,00%
24) Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	BB BB 7 Dokumen	98,69%	95,00%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		95,10%	<u>100%</u>
25) Penyusunan Dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah	6 Item 2 Sektor	96,61%	100,00%
26) Penyelenggaraan pameran investasi	10 Potensi 8 Kali	93,68%	100,00%
27) Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	2 Kemitraan	97,07%	100,00%
28) Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100% 50%	95,31%	100,00%
29) Pelayanan Penanaman Modal	9 Kab/Kota 50%	94,08%	100,00%
30) Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan	1 dokumen	99,85%	100,00%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		79,86%	<u>90,40%</u>
31) Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	100%	95,66%	100,00%
32) Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi	300 Perusahaan	64,50%	86,00%
33) Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	83 BAP	82,49%	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik		92,56%	<u>81,43%</u>
34) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen	98,81%	100,00%
35) Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015	1 Dokumen	92,08%	80,00%
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik		95,44%	<u>100,00%</u>
36) Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	1 Kali	91,39%	100,00%
37) Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial	1 Kali	96,64%	100,00%
38) Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel	1 Kali	95,43%	100,00%
39) Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel	1 Dokumen	87,56%	100,00%
40) Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Secara Online	1 Paket	97,08%	100,00%
41) Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	1 Dokumen	93,83%	100,00%
42) Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	1 Kali	97,73%	100,00%

PENGUKURAN KINERJA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2017

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian Kinerja IK Sasaran (%)</i>
Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100%	86,61%	86,61%
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	85,29%	85,29%
Persentase Aset yang tercatat	Persentase Aset yang tercatat	100%		
Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang Paham	Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang Paham	100%	71,60%	71,60%
Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	10%	98,92%	98,92%
Persentase aset yang tercatat	Persentase aset yang tercatat	100%		
Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	90%		
Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Nilai Persetujuan / Rencana Investasi PMA dan PMDN Penanaman Modal (PMA/PMDN);	Rp. 10,6 Trilyun	95,10%	95,10%
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 9,2 Trilyun	79,86%	79,86%
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	92,56%	92,56%
Peningkatan Kualitas dan kemudahan Pelayanan Perzinan			95,44%	95,44%

DINAS PENANAMAN MODAL DAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIAT

PENINGKATAN INVESTASI, dgn indikator:
1.Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
2.Persentase Peningkatan Realisasi
Investasi PMA dan PMDN (%)

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, dgn
indikator:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BIDANG PERENCANAAN &PENGEMBANGAN IKLIM PM

Kinerja Utama:
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal, dgn
indikator:
1. Jumlah Kerjasama
Pemberdayaan Dunia Usaha
2. Jumlah Potensi Investasi
Daerah yang dapat
dikembangkan untuk
dipromosikan

Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal

Kinerja Utama:
Pengembangan
Perencanaan dan
Deregulasi Penanaman
Modal, dgn indikator:
1. Persentase Rekomendasi
hasil Rakor/Forum yang
ditindaklanjuti
2. Evaluasi Kebijakan
PMPTSP & RUPM yang
ditindak lanjuti
3. Jumlah Potensi Investasi
Daerah yang terinventarisir

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Kinerja Utama:
Pengembangan
Pemberdayaan Usaha, dgn
indikator:
1. Jumlah Kemitraan Dunia
Usaha

BIDANG PROMOSI

Kinerja Utama:
Peningkatan Efektifitas
Promosi, dgn indikator:
1. Nilai Persetujuan
Investasi / Rencana
Investasi

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Kinerja Utama:
Pengembangan Promosi
Investasi, dgn indikator:
1. Jumlah Item Bahan
Promosi Investasi
2. Jumlah Sektor Potensi
Investasi yang
teridentifikasi

Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelaksanaan
Promosi Investasi, dgn
indikator:
1. Jumlah Potensi investasi
daerah yang dipromosikan
2. Jumlah Pelaksanaan
Pameran investasi

BIDANG PENGENDALIAN & INFORMASI PM

Kinerja Utama:
Pengendalian Pelaksanaan
PM, dgn indikator:
1. Persentase Perusahaan
yang menyampaikan LKPM
2. Persentase Pengawasan
Perusahaan PM

Seksi Pengawasan dan Pembinaan PM

Kinerja Utama:
Peningkatan Efektifitas
Pengawasan dan
Pembinaan PM, dgn
indikator:
1. Persentase
Permasalahan Perusahaan
yang terselesaikan
2. Jumlah Perusahaan (PMA
dan PMDN) yang
melaksanakan kegiatannya

Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi

Kinerja Utama:
Peningkatan Kualitas dan
Kapasitas Data dan Sistem
Informasi Investasi, dgn
indikator:
1. Inventarisasi dan
Updating data SIPID,
Investasi, Perizinan dan
Non Perizinan
2. Persentase Kab/ Kota
yang telah Menggunakan
SIPID dan LKPM online
3. Persentase pengaduan
yang difasilitasi

BIDANG PERIZINAN PRODUKSI & INDUSTRI

Kinerja Utama:
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perizinan
Bidang Produksi&Industri,
dgn indikator:
Nilai IKM Pelayanan
Perizinan Bidang
Produksi&Industri

Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan&Energi

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelayanan
Perizinan Bidang
Kehutanan, Pertambangan,
Energi,&Perkebunan, dgn
indikator: Persentase
Pemenuhan Permohonan
Perizinan dan Non
Perizinan Bidang
Kehutanan, Pertambangan,
Energi,&perkebunan sesuai
SOP

Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan &Perdagangan

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelayanan
Perizinan Bidang
Pertanian, Kesehatan
&Perdagangan, dgn
indikator: Persentase
Pemenuhan Permohonan
Perizinan dan Non
Perizinan Bidang
Pertanian, Kesehatan
&Perdagangan sesuai SOP

BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN & SOSIAL

Kinerja Utama:
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perizinan
Bidang Sarana
Perekonomian & sosial, dgn
indikator:
Nilai IKM Pelayanan
Perizinan Bidang Sarana
Perekonomian & sosial

Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata & Tenaga Kerja

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelayanan
Perizinan Bidang Sarana
Perekonomian, Sosial,
Pariwisata & Tenaga Kerja,
dgn indikator: Persentase
Pemenuhan Permohonan
Perizinan dan Non
Perizinan Bidang Sarana
Perekonomian, Sosial,
Pariwisata & Tenaga Kerja
sesuai SOP

Seksi Perizinan Sarana PU, Penataan Ruang & Perhubungan

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelayanan
Perizinan Bidang Sarana
PU, Penataan Ruang &
Perhubungan, dgn
indikator: Persentase
Pemenuhan Permohonan
Perizinan dan Non
Perizinan Bidang Sarana
PU, Penataan Ruang &
Perhubungan sesuai SOP

BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Kinerja Utama:
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perizinan
Bidang Penanaman Modal,
dgn indikator:
Nilai IKM Pelayanan
Perizinan Bidang
Penanaman Modal

Seksi Perizinan dan Nonperizinan PM

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelayanan
Perizinan dan
Nonperizinan Bidang
Penanaman Modal, dgn
indikator: Persentase
Pemenuhan Permohonan
Perizinan dan Non
Perizinan Bidang
Penanaman Modal sesuai
SOP

Seksi Fasilitasi PM dan Regulasi Perizinan

Kinerja Utama:
Pengembangan Fasilitasi
dan Regulasi Perizinan dan
Non Perizinan, dgn
indikator:
1. Persentase Kab/ Kota
yang menerapkan
Kebijakan PM
2. Persentase Kab/Kota
yang
mengimplementasikan
SPIPISE terkait Perizinan

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT

